



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <https://http://mores.stkippasundan.ac.id/index.php>
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 2(2),
83-92.

PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Hanny Rahayu

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi
Hanyrahayu40@yahoo.com

Naskah diterima : 11 Mei 2020, Naskah direvisi : 22 Juni 2020, Naskah disetujui : 25 Juli 2020

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi oleh teori civic education (Cogan), citizenship education continuum (David Kerr). Good character yang meliputi moral knowing, moral feeling, dan moral action (Thomas Lickona). Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengkaji informasi tentang pengembangan karakter siswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Bandung Barat 2 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus, untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi secara intensif dan mendalam berkenaan dengan fenomena di atas. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi partisipan dan non-partisipan, studi dokumentasi, dan studi literatur. Dalam membuat silabus dan RPP harus memuat nilai-nilai sikap dan perilaku agar kelak mereka menjadi individu atau warga negara mempunyai potensi yang diharapkan, baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sekolah harus mengembangkan proses pembelajaran yang bermakna yang disesuaikan dengan budaya sekolah tersebut dan hal tersebut harus ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang baik sehingga proses pembelajaran siswa menjadi nyaman.

Kata Kunci : civic education, karakter pembelajaran PKn.

ABSTRACT

This study is based on the theory civic education (Cogan), citizenship education continuum (David Kerr). Good character which cover moral knowing, moral feeling, and moral action (Thomas Lickona). This study aims to explore and assess information about the character development of students through education Citizenship in SMK 2 Cihampelas Bandung Barat West Bandung regency. This research approach is qualitative case study method, to reveal and understand the realities that occur intensively and in regard to the above phenomenon. The technique of collecting data and information through interviews, observation, documentation studies, and literature studies. In making the syllabus and lesson plans, they must contain the values of attitudes and behavior so that later they become individuals or citizens who have the expected potential, both in the school environment and outside the school. Schools must develop meaningful learning processes that are adapted to the culture of the school and this must be supported by good facilities and infrastructure so that the learning process of students becomes comfortable.

Keywords: Character; Civic Education; Pkn.

PENDAHULUAN

Suatu negara yang demokratis merupakan cita-cita atau pengharapan semua bangsa. Negara yang demokratis akan memperlihatkan suatu tatanan kenegaraan yang berdaulat di mana antara pemerintah dan rakyatnya bersinergis. Artinya, antara pemerintah dan rakyatnya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama sehingga negara yang demokratis dapat tercipta dengan sendirinya. Untuk mencapai hal tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan untuk mencapai suatu pemerintahan yang demokratis. Peranan tersebut adalah karakter warga negaranya. Karakter suatu bangsa yang demokratis harus mulai diterapkan sejak masa sekolah. Apabila karakter warga negara sudah dikembangkan di sekolah maka cita-cita demokrasi yang penuh tantangan ini ke depan dapat terwujud.

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tujuan untuk membentuk siswa sebagai warga negara yang mempunyai karakter. Karakter yang diharapkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan tertuang dalam Undang-undang NKRI Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang isinya adalah:

Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya, masih ada tindak kekerasan, rendahnya etika, tidak toleransi, tidak saling menghargai. Maka dari itu, tujuan dan pengharapan dari Pendidikan Kewarganegaraan belum tercapai.

Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter dikemukakan oleh Cogan (1998: hlm.13) yang menyatakan Pendidikan Kewarganegaraan adalah kontribusi atau dampak pendidikan terhadap pengembangan karakteristik yang menandai seorang warga negara. Maka dari itu, untuk mencapai warga negara yang berkarakter diperlukanlah lingkup pendidikan formal.

Penjelasan tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bastian (Winataputra dan Budimansyah, 2007: hlm.11) yang menyatakan “ *... to apply knowledge, to solve problems, to make choices and participate in setting priorities. Hal itu diyakini akan meningkatkan “ ... their changes for survival in a rapidly shifting and diversifying job market schools should educate students for citizenship”*.

Dipihak lain kontribusi yang sama juga disampaikan oleh Djahiri (2002) dalam pernyataannya adalah bahwa dalam pembinaan karakteristik warga negara tersebut diperlukan rekayasa pendidikan dengan mengacu pada falsafah negara dan menjadikan sekolah sebagai laboratorium kewarganegaraan yang demokratis.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, dalam prakteknya menghadapi beberapa kendala yang mengakibatkan jauhnya tujuan pembelajaran PKn dan tidak bermakna. Pernyataan dari kelemahan PKn tersebut diungkapkan oleh Budimansyah (2009) yang menyatakan bahwa *pertama*, proses pembelajaran dan penilaian lebih menekankan pada dampak instruksional yang terbatas pada penguasaan materi/pada dimensi kognitif. *Kedua*, pengelolaan kelas belum

mampu menyiapkan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa.

Kelemahan lainnya disampaikan oleh Winataputra (2001:17) adalah :

yang menitikberatkan kepada pemberian PKn berubah peran dan fungsi menjadi proses yang indoktrinasi ideologi negara yang cenderung mengabaikan konsep, visi, misi, dan strategi pendidikan demokrasi sehingga terkesan kurang memberi dampak instruksional dan pengiring bagi tumbuhnya wawasan, nilai, sikap, dan keterampilan demokrasi.

Hal tersebut sejalan yang dikemukakan oleh Adler (Sidi, 2001) ada beberapa tujuan pokok pendidikan pada semua situasi, yaitu mempersiapkan anak didik untuk menjadi orang yang bermoral, seorang warga negara yang mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang warga negara, dan orang dewasa yang mampu memperoleh pekerjaan dengan cara memberikan keterampilan dasar yang umum bagi semua pekerjaan di dalam suatu masyarakat kepada anak didik.

Dari uraian tersebut, sejalan dalam penjelasan Undang-Undang NKRI Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 menjelaskan bahwa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan. Kurikulum yang sedang dilaksanakan adalah KTSP yang merupakan pengembangan dari KBK yang menuntut siswa mempunyai kompetensi yang nantinya berguna dalam kehidupan siswa.

Tujuan akhir dari Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan sekolah menengah bukan hanya ketanggapan, kritisasi, dan kreatifitas sosial, tetapi penanaman moral yang diharapkan dapat membentuk akhlak mulia siswa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang NKRI Nomer 20 Tahun 2008 Pasal 3 menyatakan menanamkan moral yang diharapkan pada karakter berakhlak mulia konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif.

Pandangan tersebut sesuai dengan pernyataan Depdiknas (2000:23) yang menyatakan bahwa:

pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dimasyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Dipertegas pandangan Bronson (1998:8) yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada tiga aspek, yaitu civic knowledge, civic disposition, dan civic skills. Pada sekolah dasar ketiga kompetensi tersebut harus diterapkan secara berimbang agar dapat membentuk siswa menjadi manusia seutuhnya.

Untuk mencapai pada pengetahuan, watak, dan keterampilan harus mengacu pada pengembangan berbagai potensi siswa baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebagaimana dikemukakan

oleh Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007: hlm.6) :

education for citizenship yang bertitik berat pada seperangkat pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap, serta nilai dan watak-watak tertentu akan berguna bagi siswa dalam partisipasinya dikehidupannya sehari-hari. Selain itu, pembelajaran haruslah kontekstual sehingga akan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji mengenai pembentukan karakter siswa yang harus dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengarah pada terwujudnya karakter yang dapat diandalkan pada peserta didik tingkat menengah. Maka dalam artikel ini, peneliti mengangkat judul penelitian mengenai “Pengembangan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan”.

PEMBAHASAN

Integrasi Pendidikan Karakter dalam PKn pada Tahap Perencanaan

Menurut Komalasari (2010) dalam merencanakan suatu pembelajaran diperlukan desain pembelajaran yang lebih menunjuk kepada cara-cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pembelajaran tertentu. Maka dari itu berdasarkan penjelasan di atas, guru dalam melaksanakan tugasnya harus profesional dan memahami serta memiliki keterampilan dalam mengembangkan

proses pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan sebagaimana tersirat dalam kurikulum tersebut. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa perencanaan proses pembelajaran harus meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Integrasi Pendidikan Karakter dalam PKn pada Tahap Pelaksanaan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran harus melingkupi :

1. Implementasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran (Rpp).
2. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Menurut Komalasari (2010) tahap pembelajaran merupakan inti proses pendidikan. Maka dari itu, peningkatan kualitas pendidikan perlu difokuskan pada kualitas pembelajaran. Dalam suatu sistem pendidikan, subsistem pembelajaran meliputi beberapa komponen sebagai berikut :

a. Peserta didik

Komponen peserta didik adalah salah satu komponen terpenting karena adanya kebutuhan peserta didik inilah yang memicu suatu proses pembelajaran. Peserta didik merupakan input suatu proses pendidikan yang harus ditransformasikan menjadi lulusan yang berpengetahuan luas,

kompeten, berketerampilan tinggi, serta memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma di dalam masyarakat tempat mereka berada.

b. Guru

Guru memiliki peran strategis dalam proses pembelajaran karena fungsinya sebagai narasumber /fasilitator dalam proses pembelajaran. Kompetensi dan profesionalisme guru sangat penting dalam proses transformasi peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki.

c. Materi dan bahan

Materi dan bahan ajar didasarkan pada tujuan pembelajaran dan kurikulum yang telah disepakati. Bahan pembelajaran berperan penting dalam proses pendidikan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, menumbuhkan sikap yang positif terhadap lingkungan dan dunia tempat tinggalnya serta berperilaku sesuai dengan norma masyarakat.

d. Media

Media berfungsi membantu peserta didik dan pengajar dalam menciptakan suatu proses pembelajaran yang efektif. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik materi yang diajarkan dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran tercapai dengan baik.

e. Sarana dan prasarana

Proses pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses

pembelajaran yang efektif. Sarana dan prasarana ini dapat berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak.

f. Biaya

Salah satu subsistem dalam pembelajaran adalah biaya. Ketersediaan biaya yang dapat menunjang kebutuhan setiap subsistem merupakan unsur penentu tercapainya kualitas pembelajaran. Rekrutmen dan pengorganisasian peserta didik, insentif guru yang berkeadilan, pengembangan dan penyediaan bahan ajar yang berkualitas, penyediaan dan penggunaan media yang tepat guna dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai seluruhnya membutuhkan biaya yang cukup.

g. Kurikulum tersembunyi

Pada dasarnya peserta didik tidak hanya belajar dari materi dan bahan ajar yang disampaikan oleh guru di kelas. Keseluruhan lingkungan sekolah, interaksi antar peserta didik dan antara guru dengan peserta didik, budaya sekolah bahkan lingkungan tempat tinggal peserta didik amat memengaruhi proses pembelajaran. Sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik, baik yang dipergunakan di sekolah maupun dalam proses belajar mandiri di rumah sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran pula.

Integrasi Pendidikan Karakter dalam PKN pada Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses

dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan (Depdiknas, 2003: hlm.20).

Sedangkan menurut Djahiri (2005:hlm. 2) evaluasi pembelajaran PKn merupakan momentum/instrumen untuk mengukur/menilai tingkat keberhasilan, kegagalan, kelebihan atau kekurangan proses dan hasil belajar serta momentum untuk melakukan *relearning* yang bersifat kontinyu, multidimensional, dan terbuka. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya evaluasi kompetensi pembelajaran dapat diukur ketercapaiannya.

Komalasari (2010) berpendapat Alat-alat penilaian yang digunakan guru di sekolah dapat berupa alat penilaian standar dan alat penilaian buatan guru sendiri. Alat penilaian standar bersumber dari pemerintah atau lembaga pembuat alat-alat penilaian, sedangkan penilaian guru bersumber dari guru sekolah. Sebuah alat penilaian yang sudah distandarisasikan disebut sebagai alat penilaian standar, biasanya dilengkapi dengan sebuah manual. Manual ini memuat keterangan-keterangan terutama yang menjelaskan tentang pelaksanaan, penskor, dan mengadakan interpretasi.

Komalasari (2010) menegaskan bahwa penilaian kelas menghasilkan informasi pencapaian kompetensi peserta didik yang dapat digunakan, antara lain:

1. Perbaikan atau remedial bagi peserta didik

Perbaikan atau remedial diberikan kepada peserta didik yang belum

mencapai kriteria ketuntasan belajar. Kegiatan dapat berupa tatap muka atau diberi kesempatan untuk belajar sendiri. Waktu remedial diatur berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dengan guru, dapat dilaksanakan pada atau di luar jam efektif. Remedial hanya diberikan untuk indikator yang belum tuntas.

2. Pengayaan

Pengayaan dilakukan bagi peserta didik yang memiliki penguasaan lebih cepat dibandingkan peserta didik lainnya atau peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar ketika sebagian besar peserta didik yang lain belum. Peserta didik yang berprestasi perlu mendapat pengayaan agar dapat mengembangkan potensi secara optimal. Salah satu kegiatan pengayaan, yaitu memberikan materi tambahan, latihan tambahan atau tugas individual yang bertujuan untuk memperkaya kompetensi yang telah dicapainya. Hasil penilaian kegiatan pengayaan dapat menambah nilai peserta didik pada mata pelajaran yang bersangkutan.

3. Bagi Guru

Guru dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan program dan kegiatan pembelajaran. Misalnya, guru dapat mengambil keputusan terbaik dan cepat untuk memberikan bantuan optimal kepada kelas dalam mencapai kompetensi yang telah ditargetkan dalam kurikulum atau guru harus mengulang pelajaran dengan mengubah strategi pembelajaran

dan memperbaiki program pembelajarannya. Perbaikan program tidak perlu menunggu sampai akhir semester, karena bisa saja perbaikan itu akan sangat terlambat.

4. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penilaian dapat digunakan kepala sekolah untuk menilai kinerja guru dan tingkat keberhasilan siswa. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat menggunakan hasil penilaian untuk memacu kinerja guru untuk mencapai hasil belajar siswa yang gemilang.

KESIMPULAN

Pengintegrasian pendidikan karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada tahap perencanaan menurut guru-guru PKn pada kelas IX di SMK Bandung Barat 2 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, yaitu membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dalam membuat silabus dan RPP harus memuat nilai-nilai sikap dan perilaku agar kelak mereka menjadi individu atau warga negara mempunyai potensi yang diharapkan, baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Selain dari itu, untuk mendukung program-program dari silabus dan RPP yang dilakukan di SMK Bandung Barat 2 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat adalah dibuat program semester dan program tahunan.

Langkah - langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru - guru PKn pada kelas IX di SMK Bandung Barat 2 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mencakup kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Dari cakupan tersebut dalam proses pembelajaran harus adanya stimulus atau

rangsangan. Dengan adanya stimulus atau rangsangan akan terjadinya interaksi sehingga potensi diri siswa selama proses pembelajaran menjadi terbentuk dan pembelajaran lebih bermakna.

Metode pembelajaran menurut guru-guru PKn pada kelas IX di SMK Bandung Barat 2 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dengan metode yang tepat akan menghasilkan tujuan pembelajaran yang maksimal. Kegunaan metode tersebut adalah siswa dikondisikan pada proses pembelajaran yang lebih terarah dan bermakna. Metode pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Bandung Barat 2 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat oleh guru PPKn di kelas IX, yaitu Diskusi, pengamatan, ceramah variasi, dan demonstrasi.

Media menurut guru bidang studi PPKn pada kelas IX SMK Bandung Barat 2 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat bahwa pelaksanaan pembelajaran di kelas tanpa menggunakan media akan sulit siswa untuk bisa memahami. Tapi dengan adanya media siswa akan menjadi aktif dan terjadinya interaksi dalam proses pembelajaran sehingga materi pembelajaran dapat dicerna dengan mudah.

Sarana prasarana menurut guru bidang studi PPKn pada kelas IX di SMK Bandung Barat 2 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu komponen terpenting dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dengan demikian, dengan adanya sarana dan prasarana yang baik proses pembelajaran siswa menjadi nyaman dan menikmati jalannya pembelajaran sampai akhir terutama

pembelajaran berupa praktek akan lebih memudahkan siswa dalam mencerna materi dengan baik.

Penilaian diasumsikan menurut guru bidang studi PPKn pada kelas IX di SMK Bandung Barat 2 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sebagai suatu alat untuk mengukur tercapai tidaknya pembelajaran. Penilaian yang dilakukan adalah **pertama**, penilaian tahap proses (teknik non-tes). Penilaian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran dari nilai-nilai tingkah laku siswa. Penilaian yang dilakukan pada tahap proses ini yang dilakukan di SMK Bandung Barat 2 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat adalah religius, kejujuran, disiplin, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat, cinta damai, peduli sosial, dan tanggung jawab. **Kedua**, penilaian tahap hasil (teknik tes). Penilaian ini dilakukan untuk memperoleh nilai-nilai secara tertulis. Penilaian tertulis yang dilakukan di SMK Bandung Barat 2 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat adalah siswa dapat menjawab soal-soal berbentuk pilihan ganda.

REFERENSI

- Acta Civicus (2008). *Inovasi Pendidikan Kewarganegaraan dan Masyarakat Multikultural Demokratis*. Bandung: Prodi PKN SPs UPI.
- Alwasilah, A. Chaedar. (2009). *Pokoknya Kualitatif (Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Arikunto, Suharsimin. (1998). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. (2010). *Bahan Penelitian Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa (Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Bogdan, B, C, dan Biklen, S, K. (1982). *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy task Force Position Paper from the Communitarian Network*.
- Branson. S. Margareth dkk. (1998). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: diterbitkan atas kerjasama: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS) dan The Asian Foundation (TAF).
- Brooks, B.D. and F.G. Goble (1981). *the Case For Character Education: The Role of the School in Teaching Values and Virtues*. Studios 4 Production.
- Budimansyah, D. (2009). *Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi: Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Pidato pengukuhan Guru Besar UPI. Bandung : tidak diterbitkan.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D dan Karim Suryadi. (2008). *PKN dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Prodi PKN SPs UPI.
- Budimansyah, D dan Syaifullah (Ed). (2006). *Pendidikan Nilai Moral*

- dalam *Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Lab. PKn FPIPS UPI.
- Cogan, J.J. (1998). *Citizenship for the 21 Century : An International Perspective on Education*. London : Cogan Page.
- Dahlia, (2011). *Pengembangan Habituasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah*. Tesis. Bandung: SPS UPI. Tidak diterbitkan.
- Depdiknas, (2003). *UUD RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas, (2009). *Tugas dan Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Kurikulum*. Jakarta: BP. Dharma Bakti.
- Degeng, N.S. (1989). *Ilmu Pembelajaran: Taksonomi Variabel*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- De Vos, G.A. (1968). "National Character" in Sills, David L. (eds) *International Encyclopedia of the Social Sciences*, New York: The Macmillan Company and the Free Press, vol. 11&12, p.14-19.
- Djahiri, A.K. (2006). *Pendidikan Nilai dan Moral dalam Dimensi PKn*. Bandung : Lab. PKn UPI.
- Gungwu, W, (Ed). (2005). *Nation Building: Five Southeast Asian Histories*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Iryana (2006). *Kontribusi Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Karakter Siswa*. Tesis. Bandung: SPS UPI. Tidak diterbitkan.
- Kahin, G McTurnan, (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Kardiman (2006). *Membangun Kembali Karakter Bangsa Melalui Situs-Situs Kewarganegaraan*. Tesis. Bandung: SPS UPI. Tidak diterbitkan.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komalasari. (2010). *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Leshin, C.B., Pollock, J., dan Reigeluth, C.M. (1992). *Instructional Design Strategies and Tacties*. Englewood Diffs: Educational Technology Publication.
- Lickona, Thomas (1992). *Educating For Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York-Toronto-London-Sydney-Auckland: Bantam Books.
- Lincoln. S. Y dan Denzin. K. Norman. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication
- Maleong. J. Lexy. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Martin, B.L. & Briggs, L.J. 1986. *The Affective and Cognitive Domains: Integration of Instruction and Research*. New York: Educational Technology Publication.
- Megawangi, R. (2004). *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta : BPMIGAS dan Star Energi.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UPI-Press.

- Moleong, L (1988). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Morgenthau, Hans J. (1963). *Politics Among Nation: The Stuggle for Power and Prace (Third Edition)*. New York: Alfred A. Knopf.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*: cetakan ketiga. Bandung: Tarsito.
- NCSS. (1972). *Curriculum Standards for Social Studies: Expectation of Excellence*. Washington DC.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa. Tahun 2010-2025*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.
- Quigley, C.N. (1991). *Civitas: A Frame Work for Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Ruminiati, (2008). *Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar*. Jakarta:Depdiknas.
- Sapriya, (2007). *Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa*. Bandung: Disertasi prodi Pendidikan IPS.
- Soekarno. (1930). *Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial tahun 1930*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Somantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Schmit. Et al. (2005). *The Heart of the Matter: Character and Citizenship Education in Alberta schools*. Canada: Alberta.
- Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas. 2010. *Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*. Tidak diterbitkan.
- Tuhuteru (2007). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda Pasca Konflik Sosial Ambon*. Tesis. Bandung: SPS UPI. Tidak diterbitkan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.